

Equal Protection, English Language Learners, and Desegregation (Study of Islamic Educational Leadership Management)

Agus Suryadi,¹ Khairani Nasution,² Muhammad Rifai Harahap,³ Mhd Syahdan Lubis,⁴ Amiruddin Siahaan,⁵ Inom Nasution⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

agussuryadi7@gmail.com, khairaninasution935@gmail.com, harahaprifai@gmail.com, syahdan16lubis@gmail.com, amiruddinsiahaan@uinsu.ac.id, inom@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The difference principle is designed to be applied in a school community setting where the previous conditions have been met. Inequality may or may not be defined in terms of race, ethnicity, gender, or socioeconomic status. For example, a student may be advantaged in one area (musical talent, for example) and disadvantaged in another (mathematical talent, for example), with little association with gender or race. This paper wants to know how the form of freedom of expression of students. The first amendment rights of students limit the freedom of students, how is the role of educational institutions in managing the freedom of students. Freedom is situationally limited in religion, law, ethics, culture and morals. The Supreme Court seeks to enforce students' First Amendment rights while knowingly admitting that students don't have the same expressive rights inside the school building gates as they do outside the gates. Legal guidelines can be ambiguous, and finding the right balance between student rights, a positive school environment, and the obligations of order and discipline can be difficult. The interaction of the system world and the lifeworld determines the school's normative environment.

Keywords: *equal protection, english language learners, desegregation, islamic educational leadership management*

ABSTRAK

Prinsip perbedaan dirancang untuk diterapkan dalam latar belakang komunitas sekolah di mana kondisi-kondisi sebelumnya telah terpenuhi. Ketidaksetaraan mungkin atau mungkin tidak didefinisikan dalam hal ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Misalnya, seorang siswa mungkin diuntungkan di satu bidang (bakat musik, misalnya) dan kurang beruntung di bidang lain (bakat matematika, misalnya), dengan sedikit hubungan dengan jenis kelamin atau ras. Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana bentuk kebebasan berekspresi peserta didik Hak amandemen pertama siswa membatasi kebebasan peserta didik, bagaimana peranan lembaga pendidikan dalam mengelola kebebasan peserta didik. Kebebasan terbatas secara situasional dalam agama, hukum, etika, budaya dan moral. Mahkamah Agung berusaha untuk mengesahkan hak Amandemen Pertama siswa sambil dengan sengaja mengakui bahwa siswa tidak memiliki hak ekspresif yang sama di dalam gerbang gedung sekolah seperti yang mereka lakukan di luar gerbang. Garis panduan hukum bisa ambigu, dan menemukan yang benar keseimbangan antara hak-hak siswa, sekolah yang positif lingkungan, dan kewajiban ketertiban dan disiplin bisa jadi sulit. Interaksi dunia sistem dan lifeworld menentukan lingkungan normatif sekolah.

Kata kunci: *perlindungan setara, pembelajar bahasa inggris, desegregasi, manajemen kepemimpinan pendidikan islam.*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana dijelaskan oleh David bahwa dalam Standar ISLLC menyerukan pemimpin pendidikan yang “menjaga nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keragaman.” Persyaratan hukum yang mencerminkan standar ini disebut perlindungan yang sama. Perlindungan yang sama berarti bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Bab ini menyajikan beberapa aspek perlindungan yang setara karena konsep tersebut berlaku untuk akses siswa ke pendidikan publik, penempatan, disiplin, pembelajar bahasa Inggris, dan desegregasi sekolah. Konsep "keadilan sebagai keadilan" John Rawls diperluas untuk mencakup diskusi tentang keadilan sosial dan modal social (David L. Stader Law, 2013: 133).

Kondisi kedua tentang keadilan sosial dan modal sosial memandang ketidaksetaraan dapat dibenarkan selama ketidaksetaraan ini memberi manfaat terbesar bagi anggota komunitas sekolah yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan). Prinsip perbedaan itu tunduk pada prinsip pertama keadilan (menjamin kebebasan dasar yang sama) dan kondisi pertama dari prinsip kedua (persamaan kesempatan yang adil). Prinsip perbedaan dirancang untuk diterapkan dalam latar belakang komunitas sekolah di mana kondisi-kondisi sebelumnya telah terpenuhi. Ketidaksetaraan mungkin atau mungkin tidak didefinisikan dalam hal ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Misalnya, seorang siswa mungkin diuntungkan di satu bidang (bakat musik, misalnya) dan kurang beruntung di bidang lain (bakat matematika, misalnya), dengan sedikit hubungan dengan jenis kelamin atau ras (David L. Stader Law, 2013: 146).

Namun, terkadang ras, etnis, dan jenis kelamin menjadi latar belakang praktik “pelacakan diam-diam” yang menghasilkan lebih sedikit peluang bagi beberapa siswa seperti Michael dalam studi kasus “In All Fairness.” Jenis diskriminasi ini adalah bentuk ketidaksetaraan yang paling berbahaya dan paling sulit untuk dihadapi. Namun, mungkin kondisi inilah yang diminta Lewis untuk ditangani oleh Suatu wilayah. Sekolah Centerville, tidak semua ketidaksetaraan dalam keranjang barang dan jasa tersedia untuk semua siswa. Sebagai contoh, menyediakan siswa dengan les ekstra, penggunaan teknologi untuk berkomunikasi lebih baik, atau bahasa Inggris sebagai kelas bahasa kedua dapat dibenarkan selama semua kondisi lain terpenuhi di sekolah ((David L. Stader Law, 2013: 147).

Fokus tulisan ini adalah membahas kebebasan peserta didik dan hak amandemen pertama peserta didik Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui bentuk

kebebasan berekspresi peserta didik, hak amandemen pertama siswa membatasi kebebasan peserta didik dan peranan lembaga pendidikan dalam mengelola kebebasan peserta didik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Keadilan Sebagai Keadilan: Mempromosikan Persamaan Dan Persaudaraan

Konsep etika sekolah yang tertata dengan baik berdasarkan gagasan John Rawls tentang kerja sama sosial dan pembenaran publik dibahas dalam Bab 5. Konsep ini diturunkan dari prinsip pertama Rawls (2001) tentang "keadilan sebagai keadilan," yang menyatakan:

Prinsip Satu: Setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang sama dan sepenuhnya memadai, skema yang sesuai dengan skema kebebasan yang sama untuk semua. Konsep keadilan sebagai keadilan akan diperluas lebih lanjut ke pertimbangan etis kesetaraan (keadilan sosial) dan persaudaraan (modal sosial) yang tertanam dalam standar ISLLC. Konsep kesetaraan dan persaudaraan dipertimbangkan dalam Prinsip Keadilan Rawls yang kedua:

Prinsip Dua: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua kondisi: pertama, mereka harus melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil; dan kedua, mereka harus memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan). Prinsip kedua Rawls terdiri dari dua kondisi di mana ketidaksetaraan mungkin ada. Kondisi pertama dari prinsip kedua mempertimbangkan kesetaraan kesempatan yang adil. Kondisi kedua dari prinsip kedua mempertimbangkan kapan ketidaksetaraan dibenarkan (David L. Stader Law, 2013: 147).

2. Kesetaraan Kesempatan yang Adil

Fundamental untuk kondisi pertama Rawls adalah gagasan tentang komunitas sekolah di mana semua peserta memiliki kesetaraan kesempatan yang adil. Kesetaraan kesempatan yang adil membutuhkan kondisi yang tidak memungkinkan beberapa pihak memiliki keuntungan tawar-menawar yang tidak adil atas orang lain dalam komunitas sekolah. Kesetaraan yang adil tidak hanya berarti bahwa kesempatan (seperti kursus lanjutan, guru terbaik, akses ke teknologi, penghargaan, beasiswa, dan kantor pilihan) harus terbuka dalam arti formal, tetapi semua anggota harus memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai dan memperoleh manfaat.

dari kesempatan-kesempatan tersebut. Artinya, semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, status sosial ekonomi, atau ras, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang dan jasa terbaik yang tersedia untuk siswa lain di komunitas sekolah. Dalam studi kasus pembuka “Dalam Semua Keadilan,” baik Alejandro dan Michael tampaknya ditolak kesetaraan kesempatan. Alejandro ditolak aksesnya ke sekolah, dan Michael tidak diberi kesempatan untuk mendaftar di kursus persiapan perguruan tinggi. Rawls menggunakan "selubung ketidaktahuan" hipotetis untuk menggambarkan konsep kesetaraan kesempatan yang adil. Di bawah selubung ketidaktahuan, pihak-pihak tidak mengetahui atau mempertimbangkan ras, etnis, jenis kelamin, atau bakat asli seperti kekuatan atau kecerdasan saat mereka berjuang untuk kesetaraan kesempatan yang adil. Konstruksi hipotetis ini memberikan pandangan dunia yang bebas dari perilaku masa lalu, kekuatan politik, atau hak kelahiran para peserta. Ini mengarah pada syarat kerjasama yang adil dan didukung oleh wacana publik. Konsep ini bersifat hipotetis karena tentu saja mustahil untuk dicapai. Namun, ide dasar tabir ketidaktahuan untuk menciptakan sistem kerjasama yang adil dan mendukung adalah kekuatan pendorong di balik kewajiban etis keadilan mendasar yang dituntut oleh standar ISLLC (David L. Stader Law, 2013: 147).

3. Perlindungan Yang Sama: Teori Hukum Untuk Mempromosikan Keadilan Dasar

Hak sipil adalah hak individu atas kebebasan pribadi yang dijamin oleh Bill of Rights dan Amandemen Ketigabelas, Empat Belas, Lima Belas, dan Kesembilan Belas Konstitusi. Hak-hak ini secara khusus menangani pemungutan suara, proses hukum, dan perlindungan yang sama di bawah hukum (Garner, 2006). Standar 5 ISLLC menggambarkan pentingnya ditempatkan pada perlindungan yang sama untuk semua siswa. Bab ini berfokus pada konsep perlindungan yang sama yang berlaku untuk diskriminasi siswa dalam akses, penempatan, dan disiplin, pelajar bahasa Inggris, dan desegregasi. Memahami dan menanggapi dengan tepat konsep-konsep hukum ini adalah bagian dari Standar ISLLC 2, 3, 4, dan 5.

4. Diskriminasi

Keluhan diskriminasi siswa berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara dapat diajukan ke Kantor Hak Sipil (OCR) dari Departemen Pendidikan AS. OCR memberlakukan beberapa undang-undang federal yang melarang diskriminasi, melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara oleh Suatu wilayah sekolah umum. melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau

asal negara oleh penerima dana federal. juga melarang Suatu wilayah untuk menggunakan struktur sekolah secara tidak adil, yang didefinisikan sebagai persyaratan penerimaan, penempatan di kelas atau nilai, penugasan ke kelas pendidikan khusus, praktik disiplin, kebijakan penangguhan/pengusiran, dan sebagainya, yang memiliki efek diskriminatif pada siswa berdasarkan pada ras, warna kulit, atau asal negara.

Pengaduan dapat diajukan oleh korban dugaan diskriminasi atau oleh orang atau kelompok lain atas nama korban yang diduga. Selain praktik pendisiplinan dan penempatan, OCR di bawah Judul VI juga mempertimbangkan masalah lingkungan yang tidak bersahabat secara rasial. Lingkungan yang tidak bersahabat secara rasial terjadi ketika pelecehan berbasis ras “cukup parah, menyebar, atau terus-menerus sehingga mengganggu atau membatasi kemampuan siswa untuk berpartisipasi atau mengambil manfaat dari layanan, kegiatan, atau peluang yang ditawarkan oleh sekolah”.

Pemimpin sekolah bertanggung jawab untuk menangani insiden pelecehan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang perilaku pelecehan tersebut. Setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa pelecehan diskriminatif telah terjadi, pemimpin sekolah memiliki kewajiban tegas untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan segera untuk mengakhiri pelecehan dan mencegahnya terulang kembali. Tujuan utama OCR adalah penyelesaian keluhan dengan memfasilitasi penyelesaian sukarela atau kesepakatan yang dinegosiasikan untuk kepatuhan sukarela. Jika negosiasi gagal, OCR akan menggunakan rujukan kasus ke Departemen Kehakiman AS (Kantor Hak Sipil, 2000, Laporan Tahunan ke Kongres). Dengan kata lain, kepatuhan dengan perjanjian OCR sukarela mungkin merupakan bagian yang lebih baik dari keberanian untuk sebagian besar Suatu wilayah sekolah yang ditemukan melanggar undang-undang diskriminasi federal (David L. Stader Law, 2013: 150).

5. Upaya Hukum Yang dilaksanakan

Dua kerangka hukum mengenai perilaku diskriminatif tersedia di bawah Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 (a) dampak yang berbeda dan (b) klaim dampak yang merugikan. Dampak yang berbeda mempertimbangkan apakah suatu kebijakan atau praktik memperlakukan kelompok tertentu di sekolah secara tidak adil atau tidak. Contoh dampak yang berbeda mungkin melibatkan perlakuan tidak adil terhadap siswa berdasarkan ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, atau

kondisi cacat. Perlakuan tidak adil dapat mencakup hal-hal seperti kebijakan dan praktik yang menyebabkan jumlah siswa kulit berwarna yang tidak proporsional dirujuk untuk tindakan disipliner; tingkat skorsing dan pengusiran yang lebih tinggi untuk berbagai kelompok siswa; dan jumlah siswa yang signifikan dalam kursus jalur rendah yang dapat diidentifikasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara. Klaim perlakuan yang berbeda membutuhkan demonstrasi perlakuan yang berbeda dan diskriminasi yang disengaja (Rousseau, J.J., 1999: 17).

Para siswa menuduh bahwa kebijakan Suatu wilayah sekolah mengakibatkan praktik pengusiran sewenang-wenang terhadap siswa Afrika-Amerika. Siswa kulit berwarna lebih mungkin untuk putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah dan lebih kecil kemungkinannya untuk lulus dibandingkan siswa kulit putih. Siswa kulit berwarna memiliki lebih sedikit akses ke kelas atau program lanjutan untuk siswa berbakat. Temuan ini membuat para peneliti menyimpulkan: “Yang menjadi perhatian hampir 17 juta siswa kulit berwarna di negara ini dan komunitas mereka adalah bahwa, terlepas dari niat siapa pun, mereka menerima pendidikan yang lebih rendah” (hal. 3). Terlepas dari niat atau kesulitan tantangan hukum yang berhasil untuk kebijakan sekolah, Standar ISLLC 4 dan 5 mengharuskan pemimpin sekolah untuk memeriksa dan mengatasi ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan di semua tingkatan. Inilah yang ditanyakan oleh Lewis dalam studi kasus “In All Fairness”. (Dewey, 2001: 38).

6. Pembelajar Bahasa Inggris

Pendidikan pelajar bahasa Inggris (ELLs) tak terhindarkan terkait dengan perdebatan politik dan filosofis tentang imigrasi ilegal, dolar pajak, dan kewarganegaraan. Sekolah luar negeri tidak luput dari perdebatan ini. Sejarah hukum seputar siswa ELL dimulai di San Francisco pada tahun 1971. Sebuah gugatan class action diajukan terhadap sistem sekolah umum San Francisco oleh siswa Cina yang tidak berbahasa Inggris dengan tuduhan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan pendidikan yang sama dan sedang ditolak perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Amendemen Keempatbelas (Lau v. Nichols, 1974). Mahkamah Agung AS tidak memvalidasi klaim perlindungan yang sama dari siswa, tetapi lebih mengandalkan dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara oleh penerima dana federal. Juga pada tahun 1974, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Kesempatan Pendidikan yang Setara (20 USC Sec. 1703), yang melarang, antara

lain, negara bagian mana pun untuk menolak kesempatan pendidikan yang sama kepada seorang individu karena ras, warna kulit, jenis kelamin, atau asal negara, dengan gagal mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi hambatan bahasa yang merintangi partisipasi yang setara dalam program pengajaran (David L. Stader Law, 2013: 152).

Pada tahun 1981, Pengadilan Banding Sirkuit Kelima mengembangkan tes tiga cabang untuk menentukan apakah Suatu wilayah sekolah sesuai dengan Undang-Undang Kesempatan Pendidikan yang Setara (*Castaneda v. Pickard*, 1981). Tes tiga bagian termasuk yang berikut: Sekolah sedang mengejar program yang diinformasikan oleh teori pendidikan yang diakui oleh beberapa ahli di lapangan atau, setidaknya, dianggap strategi eksperimental yang sah; (2) program dan praktik yang benar-benar digunakan oleh sistem sekolah diperhitungkan secara wajar untuk menerapkan secara efektif teori pendidikan yang dianut sekolah; dan (3) program sekolah berhasil, setelah percobaan yang sah, dalam menghasilkan hasil yang menunjukkan bahwa hambatan bahasa yang dihadapi siswa benar-benar diatasi. Sirkuit Kelima juga menyimpulkan bahwa pemisahan siswa ELL hanya diperbolehkan jika manfaatnya lebih besar daripada efek buruk dari pemisahan tersebut.

Pada tahun 1982, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa Amandemen Keempat belas melarang negara bagian menolak akses ke pendidikan umum gratis untuk setiap anak yang tinggal di negara bagian, baik yang hadir di Amerika Serikat secara legal atau sebaliknya (*Plyler v. Doe*, 1982). *Plyler* menetapkan bahwa siswa ELL berhak atas barang dan jasa yang sama yang disediakan oleh sekolah umum untuk semua anak yang tinggal di dalam batas-batas Suatu wilayah . *Plyler* menjelaskan bahwa status tidak berdokumen atau bukan warga negara dari anak atau orang tuanya tidak relevan dengan hak anak atas pendidikan public seperti yang dinyatakan Pengadilan di *Plyler*, “Jelas, tidak ada anak yang bertanggung jawab atas kelahirannya dan menghukum . . . anak adalah cara yang tidak efektif dan juga tidak adil untuk menghalangi orang tua.” (Perry-Hazan, Lotem , 2015: 32).

Menurut Kantor Hak Sipil Suatu wilayah sekolah dapat: Mengharuskan siswa atau orang tua mereka untuk memberikan bukti tempat tinggal di dalam Suatu wilayah. Misalnya, Suatu wilayah mungkin memerlukan salinan tagihan telepon dan air atau perjanjian sewa untuk mendirikan tempat tinggal. Namun, persyaratan Suatu wilayah sekolah untuk mendirikan tempat tinggal harus diterapkan dengan

cara yang sama untuk semua anak. Suatu wilayah sekolah mungkin memerlukan akta kelahiran untuk memastikan bahwa seorang siswa termasuk dalam persyaratan usia minimum dan maksimum yang diamanatkan Suatu wilayah. Namun, kabupaten tidak boleh menolak pendaftaran berdasarkan akta kelahiran asing. Meminta nomor jaminan sosial siswa selama pendaftaran untuk menggunakannya sebagai nomor identifikasi siswa. Suatu wilayah harus memberi tahu siswa dan orang tua bahwa memberikan nomor jaminan sosial bersifat sukarela dan menjelaskan bagaimana nomor tersebut akan digunakan. Sebuah suatu wilayah dapat meminta data ras atau etnis.

7. Menghubungkan Standar Untuk Praktek Diskriminasi

Tinjauan Asisten Pengawas Sharon Grey tentang pendaftaran Suatu wilayah dalam kursus penempatan pra-lanjutan dan penempatan lanjutan (AP) menunjukkan bahwa representasi siswa kulit berwarna yang tidak proporsional terlihat jelas di Sekolah Menengah Pocono dan Jefferson (lihat Diskriminasi atau Pengetahuan Latar Belakang Bagian I, Bab 1). Dia juga tahu dari pengalamannya sebagai kepala sekolah Riverboat High bahwa sebagian besar kursus AP memiliki representasi siswa Afrika-Amerika dan Hispanik yang tidak proporsional dibandingkan dengan populasi sekolah menengah secara keseluruhan. Ketika dia bertanya kepada konselor sekolah menengah mengapa ini terjadi, dia diberitahu alasan utamanya adalah siswa belum menyelesaikan kursus pra-AP di sekolah menengah, sehingga membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk kursus AP di sekolah menengah (David L. Stader Law , 2013: 159).

Sharon prihatin dengan masalah ini dan telah bertemu beberapa kali dengan kepala sekolah Pocono dan Jefferson Middle School dan kepala sekolah Riverboat High School untuk mengatasi masalah tersebut. Para pelaku juga prihatin dan mengeksplorasi pilihan mereka. Salah satu opsi yang menjanjikan tampaknya adalah program yang disebut Advancement via Individual Determination (AVID). AVID telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan populasi tradisional yang kurang terwakili di AP dan kursus kredit ganda di beberapa negara bagian, termasuk Texas dan California. Namun, program AVID diperlukan bahwa seorang koordinator dipekerjakan dan bahwa para guru memberikan kesempatan untuk mengajar siswa dalam program tersebut (Mackay, A , 2015: 40).

Sharon telah meminta tiga kepala sekolah untuk menggunakan model etika wacana (Bab 3) dan bertemu dengan fakultas yang akan terpengaruh oleh program AVID untuk membangun dukungan. Sayangnya, sebagian besar fakultas yang terkena dampak berpendapat bahwa Suatu wilayah tersebut tidak mampu menyediakan guru tambahan di

setiap gedung dan akan memakan terlalu banyak waktu untuk mengajar para siswa ini. Mereka juga akan merasa tertekan untuk menurunkan standar mereka. Sharon kecewa dengan tanggapannya. Pengawas mendukung program AVID dan merasa bahwa kabupaten tidak mampu untuk tidak mengatasi masalah tersebut. Pengawas meminta Sharon untuk memberikan rekomendasi tertulis. Pertanyaan Berdebat atau menentang penambahan program AVID di dua sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kabupaten tersebut. Mengutip standar ISLLC yang berlaku; surat Rekan yang Terhormat tanggal 26 Oktober 2010, dan 6 Mei 2011; kekhawatiran fakultas yang terpengaruh.

C. HASIL PEMBAHASAN

Seiring tren pembubaran ordo desegregasi berlanjut, kekhawatiran mengenai segregasi sekolah-sekolah Amerika telah diungkapkan. Misalnya, Orfield, Frankenberg, dan Lee (2003) menunjukkan dari penelitian mereka di Universitas Harvard bahwa penguraian integrasi dan kembalinya ke sekolah terpisah telah terjadi pada dekade sebelumnya. Para penulis menemukan bahwa sekolah umum AS lebih terpisah pada tahun 2003 daripada sebelum busing, sekolah magnet, dan redistricting terjadi pada awal 1970-an. Akibatnya, siswa Latin dan Afrika-Amerika menjadi lebih dipisahkan secara rasial sementara rata-rata siswa kulit putih bersekolah di sekolah yang 80% kulit putih (David L. Stader Law, 2013: 152).

Sebagai tanggapan, Tujuan untuk secara aktif mempromosikan dan menciptakan sekolah multiras mungkin secara politis tidak stabil karena memerlukan pertimbangan ras atau etnis dalam tugas sekolah siswa. Pertanyaan hukumnya sederhana. Apakah praktik memilih atau menempatkan siswa di sekolah tertentu atas dasar ras atau etnis dengan tujuan mengintegrasikan sekolah dalam suatu wilayah diperbolehkan secara konstitusional? Jawabannya, jarang. Ras dan etnis adalah kelas tersangka. Oleh karena itu, Mahkamah Agung AS menerapkan pengawasan ketat terhadap kasus-kasus ini. Pengawasan yang ketat adalah standar yang paling ketat untuk dipenuhi. Untuk menang, negara harus menunjukkan bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mencapai kepentingan negara yang memaksa.

Kemudian negara akan memiliki beban untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh kabupaten secara sempit disesuaikan untuk mencapai tujuan sekolah terpadu. Ini adalah rintangan yang sangat sulit untuk diatasi. Mahkamah Agung AS mempertimbangkan pertanyaan tentang penggunaan ras sebagai bagian

dari kriteria seleksi dalam dua kasus tahun 2003 yang melibatkan pendidikan tinggi. Kasus pertama, *Gratz v. Bollinger* (2003), dianggap sebagai praktik penerimaan mahasiswa baru sarjana Universitas Michigan yang memberikan “poin” kepada siswa dalam ras atau kelompok etnis minoritas yang “kurang terwakili”.

Pengadilan menemukan praktik ini melanggar Klausul Perlindungan Setara karena berbagai alasan. Kasus kedua, *Grutter v. Bollinger* (2003), mempertimbangkan kebijakan penerimaan Sekolah Hukum Universitas Michigan yang dirancang untuk mendaftarkan "massa kritis" siswa yang kurang terwakili. Dalam praktik ini, sekolah mempertimbangkan setiap pelamar yang memenuhi syarat secara individual dan melalui proses individual ini secara aktif berusaha untuk menerima beberapa kelompok minoritas yang kurang terwakili untuk tujuan mencapai tubuh siswa yang beragam.

Pengadilan menemukan bahwa sekolah hukum memiliki kepentingan negara bagian yang memaksa untuk mendapatkan siswa yang beragam, dan program kesadaran ras dari kebijakan penerimaan memiliki ciri-ciri dari rencana yang dirancang secara sempit untuk mencapai minat seperti itu. Pada dasarnya rencana sekolah hukum tidak terfokus pada ras saja tetapi mempertimbangkan semua faktor seleksi yang dapat berkontribusi pada beragamnya siswa. Fakta bahwa Pengadilan menemukan badan siswa yang beragam menjadi kepentingan negara bagian yang menarik di *Grutter* mungkin tampaknya menjadi pertanda baik untuk pertimbangan ras atau etnis dalam upaya suatu wilayah sekolah untuk menciptakan dan mempertahankan sekolah yang beragam secara budaya (M. Dawam Raharjo, 1999: 262).

Ini bukan kasusnya. In *Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1* (2007), diputuskan bersama dengan Dewan Pendidikan *Meredith v. Jefferson County*, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa praktik penempatan siswa ke sekolah umum semata-mata untuk tujuan mencapai sekolah yang seimbang secara ras adalah inkonstitusional. Suatu wilayah Sekolah Seattle mengizinkan siswa untuk mendaftar ke sekolah menengah mana pun di Suatu wilayah tersebut. Beberapa sekolah menengah secara alami lebih menarik bagi siswa daripada yang lain. Ketika sekolah menengah ini menjadi kelebihan permintaan (yaitu, menerima lebih banyak aplikasi siswa daripada ruang yang diizinkan), Suatu wilayah menggunakan sistem pemutus untuk memutuskan siswa mana yang kelebihan permintaan yang akan diterima. Pemecah ikatan terpenting

kedua dalam rencana Seattle adalah faktor ras yang dimaksudkan untuk mempertahankan keragaman ras.

Suatu wilayah Sekolah Jefferson County, di sisi lain, menugaskan siswa ke sekolah tertentu berdasarkan susunan rasial masing-masing sekolah. Ras didefinisikan oleh Suatu wilayah sebagai Hitam dan "Lainnya." Siswa Asia, Hispanik, dan Kulit Putih diklasifikasikan sebagai "Lainnya." Pengadilan menyatakan bahwa rencana tugas siswa dari Seattle Public Schools dan Jefferson County Public Schools tidak memenuhi persyaratan minat yang disesuaikan secara sempit dan menarik untuk rencana tugas berbasis ras karena mereka digunakan hanya untuk mencapai "keseimbangan rasial." Singkatnya, sekolah umum tidak boleh menggunakan ras sebagai satu-satunya faktor penentu untuk menempatkan siswa ke sekolah (M. Dawam Raharjo, 1999: 262).

Hakim Roberts menyimpulkan pendapat mayoritasnya dengan menyatakan, "Cara menghentikan diskriminasi atas dasar ras adalah dengan menghentikan diskriminasi atas dasar ras." Ringkasan Konsep keadilan sosial dan perlindungan yang setara tertanam di seluruh standar ISLLC yang dibahas dalam teks ini. Keadilan sosial berarti bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sekeranjang barang dan jasa terbaik yang tersedia untuk semua siswa lain di sekolah. Kesempatan yang sama tidak berarti bahwa siswa tidak boleh diperlakukan berbeda. Faktanya, siswa dapat diperlakukan secara berbeda selama perbedaan itu dirancang untuk memberi manfaat bagi mereka yang paling tidak diuntungkan (David L. Stader Law , 2013: 159).

Konsep John Rawls tentang sekolah atau Suatu wilayah berdasarkan kerjasama sosial dan pembenaran publik (Prinsip Pertama) dan kesempatan yang sama dan perbedaan yang dapat dibenarkan (Prinsip Kedua) memberikan panduan etis dalam menciptakan komunitas sekolah di mana keadilan sosial dan modal sosial dapat berkembang. Perlindungan yang setara berarti bahwa hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, atau etnis. Konsep-konsep ini dikodifikasikan dalam Judul VI Undang-Undang Hak Sipil, yang melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, atau asal kebangsaan. Pelanggaran terhadap Judul VI tampaknya sulit untuk ditunjukkan, terutama ketika keamanan sekolah menjadi masalah. Namun, keadilan sosial mensyaratkan bahwa kebijakan dan praktik sekolah diperiksa untuk menentukan apakah kebijakan-kebijakan ini secara berbeda mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu di sekolah. Jika penentuan ini dibuat, standar ISLLC menciptakan kewajiban afirmatif untuk merespons.

Tinjauan Asisten Pengawas Sharon Grey tentang pendaftaran Suatu wilayah dalam

kursus penempatan pra-lanjutan dan penempatan lanjutan (AP) menunjukkan bahwa representasi siswa kulit berwarna yang tidak proporsional terlihat jelas di Sekolah Menengah Pocono dan Jefferson (lihat Diskriminasi atau Pengetahuan Latar Belakang Bagian I, Bab 1). Dia juga tahu dari pengalamannya sebagai kepala sekolah Riverboat High bahwa sebagian besar kursus AP memiliki representasi siswa Afrika-Amerika dan Hispanik yang tidak proporsional dibandingkan dengan populasi sekolah menengah secara keseluruhan. Ketika dia bertanya kepada konselor sekolah menengah mengapa ini terjadi, dia diberitahu alasan utamanya adalah siswa belum menyelesaikan kursus pra-AP di sekolah menengah, sehingga membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk kursus AP di sekolah menengah (David L. Stader Law , 2013: 159).

Sharon prihatin dengan masalah ini dan telah bertemu beberapa kali dengan kepala sekolah Pocono dan Jefferson Middle School dan kepala sekolah Riverboat High School untuk mengatasi masalah tersebut. Para pelaku juga prihatin dan mengeksplorasi pilihan mereka. Salah satu opsi yang menjanjikan tampaknya adalah program yang disebut Advancement via Individual Determination (AVID). AVID telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan populasi tradisional yang kurang terwakili di AP dan kursus kredit ganda di beberapa negara bagian, termasuk Texas dan California. Namun, program AVID diperlukan bahwa seorang koordinator dipekerjakan dan bahwa para guru memberikan kesempatan untuk mengajar siswa dalam program tersebut (Mackay, A , 2005: 423).

Sharon telah meminta tiga kepala sekolah untuk menggunakan model etika wacana (Bab 3) dan bertemu dengan fakultas yang akan terpengaruh oleh program AVID untuk membangun dukungan. Sayangnya, sebagian besar fakultas yang terkena dampak berpendapat bahwa suatu wilayah tersebut tidak mampu menyediakan guru tambahan di setiap gedung dan akan memakan terlalu banyak waktu untuk mengajar para siswa ini. Mereka juga akan merasa tertekan untuk menurunkan standar mereka. Sharon kecewa dengan tanggapannya. Pengawas mendukung program AVID dan merasa bahwa kabupaten tidak mampu untuk tidak mengatasi masalah tersebut. Pengawas meminta Sharon untuk memberikan rekomendasi tertulis. Pertanyaan Berdebat atau menentang penambahan program AVID di dua sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kabupaten tersebut. Mengutip standar ISLLC yang berlaku; surat Rekan yang Terhormat tanggal 26 Oktober 2010, dan 6 Mei 2011; kekhawatiran fakultas yang terpengaruh.

D. KESIMPULAN

Siswa sering ingin mengekspresikan keinginan mereka untuk mandiri dari otoritas orang tua dan sekolah dalam berbagai cara, termasuk pilihan pakaian, bahasa, dan simbol. Namun, keinginan kebebasan berekspresi yang muncul secara alami ini dapat berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di sekolah. Pedoman hukum dapat menjadi ambigu, dan menemukan keseimbangan yang tepat antara hak-hak siswa, lingkungan sekolah yang positif, dan kewajiban untuk ketertiban dan disiplin dapat menjadi sulit. Kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan yang memiliki batas. Dalam pelaksanaan kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Tujuannya agar menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kebebasan pada umumnya atau seringkali disalahtafsirkan dengan tindakan yang cenderung keablasan. Kebebasan diartikan sebagai kondisi yang benar-benar bebas, tanpa batas, aturan dan rambu. Padahal selalu ada batas dalam kebebasan dalam suatu situasional. Kebebasan terbatas secara situasional dalam agama, hukum, etika, budaya dan moral. Mahkamah Agung berusaha untuk mengesahkan hak Amandemen Pertama siswa sambil dengan sengaja mengakui bahwa siswa tidak memiliki hak ekspresif yang sama di dalam gerbang gedung sekolah seperti yang mereka lakukan di luar gerbang. Garis panduan hukum bisa ambigu, dan menemukan yang benar keseimbangan antara hak-hak siswa, sekolah yang positif lingkungan, dan kewajiban ketertiban dan disiplin bisa jadi sulit. Interaksi dunia sistem dan lifeworld menentukan lingkungan normatif sekolah. Namun, dunia sistem dan dunia kehidupan terus bersaing untuk mendapatkan dominasi, menciptakan ketegangan antara kebebasan dan ketertiban. Keseimbangan yang tepat diperlukan untuk budaya sekolah yang teratur dan positif. Namun, di banyak sekolah, dunia sistem mendominasi dunia kehidupan siswa, yang mengakibatkan hilangnya signifikansi, keterasingan, dan keputusasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin. (2011). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- David L. Stader Law. (2013). *And Ethics in Educational Leadership Southeast Missouri State University* ucational law and legislation: United States.
- Dewey, J. (1997). *Experience and Education*. USA: Published by Agreement with Southern Illinois University Press.
- Gutek, L.L. (1974). *Philosophical Alternatives in Education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company
- Harber, C. (1993). *Democratic Management and School Effectiveness in Africa: Learning from Tanzania*. Compare, 23, 1-8.
- Heckman, P.E., (1993). *School Restructuring in Practice Reckoning with The Culture School*. *International Journal of Educations Reform*, 3, 263-271.
- M. Dawam Raharjo. (1999). *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Mackay, A. (2005). Student Freedom of Expression: *Violent Content and the Safe School Balance*. McGill journal of education. 40. 423.
- Perry-Hazan, Lotem. (2015). *Freedom of Speech In Schools And The Right To Participation: When The First Amendment Encounters The Convention On The Rights Of The Child*. Brigham Young University Education and Law Journal. 2015.
- Rijal, F. (2015). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning Pada Konsep Tumbuhan Hijau Di Kelas V MIN Tungkob Aceh Besar. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Rijal, F. (2018). PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI RUKUN IMAN PADA SISWA KELAS I SD NEGERI 49 KOTA BANDA ACEH. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 7(1).
- Rijal, F., Nudin, B., & Samad, I. A. (2022). LEARNING INNOVATION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION AT MTsN MODEL IN ACEH. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2).
- Rousseau, J.J. (1997). *The Social Contract and Other Later Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thornberg, R. (2010). *School Democratic Meetings: Pupil Control Discourse in Disguise*. *Teaching and Teacher Education*, 26, 924–932.
- Widyaningsih, T. S., Zamroni, Zuchdi, D. (2014). *Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SMP dalam Perspektif Fenomenologis* (Studi kasus di SMP 2 Bantul). *Jurnal Pengembangan Pendidikan. Fondasi dan Aplikasi*. 2, 181-195.